

Buletin Parlementaria

Nomor 1002/II/IV/2018 • April 2018



DPR Setujui Calon Gubernur dan Deputi Gubernur BI



DPR Terima IHPS II BPK Tahun 2017



DPR Setujui Calon Gubernur dan Deputy Gubernur BI

Sidang Paripurna DPR RI menyetujui penetapan Perry Warjiyo sebagai Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Doddy Budi Waluyo sebagai Calon Deputy Gubernur BI periode 2018-2023. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jabatan Gubernur dan Deputy Gubernur BI diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Taufik

Kurniawan usai memimpin Sidang Paripurna berharap, Perry Warjiyo mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ditengah ketidakpastian global dan semakin kompetitifnya persaingan antar negara di era globalisasi seperti sekarang.

“Yang jadi perhatian publik adalah nilai tukar rupiah. Ini tugasnya Gubernur BI yang baru, agar nilai tukar rupiah dapat dimaksimalkan. Jangan

sampai di angka psikologis Rp15.000 per dolar AS. Ini jadi tantangan agar Gubernur BI yang baru bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” ungkap Taufik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4).

Politisi F- PAN itu juga memberikan apresiasi atas kompak dan solidnya jajaran Bank Indonesia selama proses pergantian pimpinan ini. Taufik pun menuturkan ini harus menjadi kekuatan dalam menghadapi dunia perekonomian yang semakin kompetitif.

“Tadi sangat kompak timnya. Hadir juga Gubernur, Deputy Gubernur dan jajaran Direksi BI yang lama. Ini menunjukkan *teamwork* BI, ini harus jadi kekuatan dalam menghadapi tantangan ke depan. Kalau timnya sudah kuat, maka hal terkait fundamental moneter dapat mudah diatasi,” ungkap politisi dapil Jawa Tengah itu.

Sementara itu, dalam laporannya dihadapan Sidang Paripurna, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengatakan, setelah mendengarkan masukan, saran dan pendapat dari seluruh fraksi, rapat internal Komisi XI DPR RI memutuskan secara musyawarah mufakat untuk

menetapkan Perry Warjiyo sebagai Calon Gubernur BI dan Doddy Budi Waluyo sebagai Calon Deputy Gubernur BI periode 2018-2023.

“Kami mengharapkan agar Calon Gubernur Bank Indonesia dan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia terpilih dapat menjaga stabilitas perekonomian nasional dalam menghadapi adanya potensi gejala ekonomi global,” kata Hafisz.

Politisi F-PAN itu melanjutkan, stabilitas perekonomian tersebut harus dilakukan dengan kebijakan moneter yang ditekankan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah. Calon Gubernur dan Deputy BI terpilih diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah, OJK, dan DPR RI terkait dengan kebijakan BI di bidang moneter, makroprudensi, dan sistem pembayaran dengan tetap menjaga independensi BI.

“Kami juga berharap agar kebijakan-kebijakan Bank Indonesia ke depan dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan mengatasi permasalahan kesenjangan ekonomi di Indonesia,” pungkasnya. ■ dep.hs/sf/sc



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dan Pimpinan DPR RI menerima laporan penetapan calon Gubernur BI dan Deputy Gubernur BI dari Wakil Ketua Komisi XI A. Hafisz Tohir

Foto andri/od



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Gubernur BI Diharapkan Jaga Stabilitas Ekonomi

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi menetapkan Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Dody Budi Waliyo sebagai Deputy Gubernur BI periode 2018-2023. Penetapan dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap terpilihnya Gubernur BI dan Deputy BI dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional dalam menghadapi adanya potensi gejolak ekonomi global. “Stabilitas perekonomian harus dilakukan dengan kebijakan moneter yang dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai tukar rupiah,” ungkap Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4).

Fadli menjelaskan, stabilitas nilai tukar sangat penting, karena kita tahu nilai tukar rupiah saat ini sudah mencapai Rp13.800 jangan sampai naik menjadi Rp15.000 akan sangat memberatkan dan dikhawatirkan akan menjadi awal mula krisis ekonomi.

“Kami berharap Gubernur BI dapat bekerja sesuai tupoksi. Apalagi kita tahu sekarang ini, situasi ekonomi global, kebijakan dari sejumlah negara yang langsung berimplikasi bagi ekonomi Indonesia. Kebijakan moneter dan penguatan rupiah menjadi penting,” jelasnya.

Sebelum dilantik, Gubernur BI dan Deputy Gubernur BI telah melalui *fit and proper test* yang dilakukan Komisi XI DPR. ■ rmm/sc



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Suciati, S.Sos, Sofyan Efendi

SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto

ANGGOTA REDAKSI
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati,
Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi,
Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega,
Ila Rachmayati, Mahir Pratama, Taufan Syahrulli

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief
Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI
Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito

STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,
Erman Suhendri, S.Sos.I, Mustaqim, S.Kom.I

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didampingi Pimpinan DPR RI menerima IHPS II Tahun 2017 dari Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara

Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Taufik Kurniawan, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara melaporkan 449 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 6 (1 persen) LHP Keuangan, 239 (53 persen) LHP Kinerja, dan 204 (46 persen) LHP dengan Tujuan Tertentu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Moermahadi mengungkapkan ada 4.430 temuan yang memuat 5.852 permasalahan. Rinciannya, 1.082 (19 persen) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), kemudian 1.950 (33 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan senilai Rp10,56 triliun, dan 2.820 (48 persen) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan senilai

Pimpinan DPR Terima IHPS II BPK Tahun 2017

Dewan Perwakilan Rakyat akan segera merespon Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017 yang dibuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu menyusul diteruskannya laporan ketidakpatuhan keuangan negara tersebut dalam Sidang Paripurna Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2018, Selasa (4/3).

Rp2,67 triliun.

Dari 1.950 permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 1.452 (74 persen) senilai Rp10,56 triliun yang terdiri atas permasalahan yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak 840 (58 persen) permasalahan senilai

Rp1,46 triliun, potensi kerugian negara sebanyak 253 (17 persen) permasalahan senilai Rp5,04 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 359 (25 persen) permasalahan senilai Rp4,06 triliun.

Selain itu, terdapat 2.820 ketidakhematan, ketidakefisienan,



Foto: azka/od

Ada 4.430 temuan yang memuat 5.852 permasalahan.

dan ketidakefektifan senilai Rp2,67 triliun terdapat 69 permasalahan ketidakehematan 2 persen senilai Rp285,54 miliar, 12 permasalahan ketidakefisienan 1persen senilai Rp51,06 miliar, dan 2.739 permasalahan ketidakefektifan 97 persen senilai Rp2,33 triliun.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menuturkan akan segera menindaklanjuti hasil laporan tersebut, nantinya akan dibahas melalui komisi terkait. “Ya, hasil pemeriksaan BPK ini nanti akan ditindaklanjuti melalui komisi terkait,” tutur Taufik. ■ hs/sc

USBN Harus Mengutamakan Kejujuran



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

Foto: runi/od

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berharap seluruh murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mengikuti Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) pada 2 - 4 April, dapat mengutamakan kejujuran, kendati prestasi juga tak kalah pentingnya.

“Kabarnya, UN tahun ini ada yang berbasis komputer atau UNBK, ada juga yang masih menggunakan kertas pensil. Terlepas bagaimana metodenya, kita mendorong semua peserta UN dapat menjalankan seluruh soal dengan serius, dan penuh kejujuran. Prestasi penting, namun jujur jauh lebih penting,” ungkap Taufik melalui rilis yang diterima Parlemen, Senin (2/4).

Menurut Taufik, jika kejujuran sudah dipupuk sejak dini, khususnya di lingkungan sekolah, akan menghasilkan generasi yang berintegritas. Ia pun melihat, terkait adanya isu kebocoran soal UN, ia menilai sebaiknya murid tidak perlu percaya dengan isu-isu itu. Ia mendorong agar siswa lebih mempersiapkan diri.

“Isu soal bocor itu tak penting. Toh ketika murid itu sudah mempersiapkan semuanya, dan percaya diri, pasti mampu menjawab soal-soal yang diujikan. Lebih baik persiapan segalanya, dan belajar lebih giat lagi. Selamat UN buat semua siswa, semoga bisa mendapatkan nilai terbaik,” harap Waketum PAN itu.

Diketahui, UN bagi siswa jenjang SMA/Madrasah Aliyah (MA) akan berlangsung pada 9 hingga 12 April 2018 mendatang. Adapun untuk peserta didik yang tidak dapat mengikuti UN pada tanggal yang ditentukan dapat mengikuti UN susulan pada 17 dan 18 April 2018. Sementara pada jenjang SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs), UN akan dilaksanakan pada 23 sampai dengan 26 April 2018. Dan UN susulan SMP/MTs akan diselenggarakan pada 8 dan 9 Mei 2018. ■ rmm/sc



Revolusi Industri Tantang Pengusaha Muda Zaman Now

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didampingi Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Raya

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta para pengusaha muda ikut menyukseskan Indonesia dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Ia yakin, dengan peran para pengusaha muda, bangsa Indonesia tak hanya menjadi *follower*, namun akan menjadi *trendsetter*.

“Revolusi Industri 4.0 adalah keniscayaan yang tak bisa dielakan. Bangsa kita harus siap. Jika tidak, kita akan tenggelam dalam bayang-bayang bangsa lain,” jelas Bamsoet, sapaan akrabnya, saat menerima Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Jakarta Raya

di ruang kerja Pimpinan DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4).

Dijelaskannya, DPR RI telah siap menyambut Revolusi Industri 4.0, yakni lewat RUU Kewirausahaan Nasional yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah, salah satu isinya adalah memberikan

keringanan pajak kepada wirausaha yang bergerak di bisnis *startup*. Ia berharap kebijakan ini disambut baik oleh HIPMI Jakarta Raya.

“Kita sedang menggodok aturan agar bisnis *startup* bisa diberikan keringanan, tak perlu membayar pajak di awal 3-4 tahun usahanya. Ini untuk merangsang lahirnya berbagai kreativitas bisnis *startup*, sehingga kita mampu unggul dalam Revolusi Industri 4.0,” ujar Bamsoet.



Foto: jayedi/od

Sebagai senior HIPMI, politisi Partai Golkar ini juga mendorong anggota HIPMI Jakarta Raya agar tak lelah belajar, serta senantiasa meningkatkan kemampuan masing-masing individu. Terlebih lagi dengan adanya persaingan global yang ke depannya akan semakin sulit karena dunia berubah secara cepat.

“Jangan jadikan HIPMI sekadar tempat mencari pekerjaan. Para anggota harus memanfaatkan wadah HIPMI Jakarta Raya sebagai tempat memperluas jaringan. Membangun *networking* sangat penting, efeknya akan kalian rasakan di

masa yang akan datang. Bangun bangsa dan negara dengan menjadi pengusaha yang berintegritas dan memiliki jiwa nasionalisme,” pesannya.

Pada kesempatan itu Ketua HIPMI Jakarta Raya Afifuddin Kalla mengatakan bahwa HIPMI Jakarta Raya mendukung RUU Kewirausahaan Nasional agar segera disahkan. Bagi HIPMI Jakarta Raya, RUU tersebut akan menjadi landasan hukum yang kuat dalam meningkatkan jumlah pengusaha, mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu memerangi kemiskinan.

Tidak hanya itu, Afifuddin juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar pendidikan dan pelatihan kepada para anggotanya. Tema yang diambil juga tak lepas dari Revolusi Industri 4.0.

“Lebih kurang ada 300 anggota kita yang baru, mereka bergerak di bisnis *startup* dan ekonomi kreatif. Kita ingin menyiapkan para anggota HIPMI menyukseskan Indonesia dalam memasuki Revolusi Industri 4.0 melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diadakan HIPMI Jakarta Raya,” ujar Affifudin. ■ ayu/sc



Pimpinan DPR RI bersama dengan dua Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial

Foto: andri/od

Paripurna DPR Setujui Dua Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial

Sidang Paripurna DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyetujui dua Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung, yaitu Dr. Junaedi, SH., SE., MSi dari unsur SP/SB, dan Soengeng Santoso PN, SH., MM, MH dari unsur APINDO.

Setelah Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir menyampaikan laporan Komisi III DPR mengenai proses pembahasan calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung, Taufik menanyakan kepada Anggota DPR RI. Sidang dewan yang terhormat apakah laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil pembahasan calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung dapat disetujui? tanya Taufik, di Ruang Sidang Paripurna, Nusantara II, Jakarta, Selasa (3/4). Lalu dijawab "setuju" oleh peserta sidang, ketukan palu menandai pengesahan keputusan.

Sebelumnya menurut laporan Kahar Muzakir, Komisi III DPR RI telah melaksanakan Rapat Pleno pada 5 Maret 2018 untuk membicarakan tahapan uji kelayakan diantaranya membahas rancangan mekanisme dan

tata tertib, rancangan jadwal, rancangan pengumuman di media cetak, rancangan judul makalah dan rancangan surat pernyataan yang akan ditandatangani calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA.

Dalam pelaksanaan persiapan tahapan uji kelayakan terhadap calon, telah diumumkan empat nama calon Hakim Ad Hoc Hubungan industrial di MA pada Surat Kabar Nasional guna mendapatkan masukan dari masyarakat luas.

Kahar juga melaporkan pada 22 Maret 2018, pembahasan dilanjutkan dengan pengambilan nomor urut oleh para calon dan pembuatan makalah yang ditujukan untuk mengetahui mengenai visi dan misi apabila calon terpilih menjadi Hakim Ad Hoc Hubungan Industri di MA.

Selanjutnya, pada hari Senin, 26 Maret 2018, pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, Komisi III DPR

RI melaksanakan Uji Kelayakan terhadap 4 (empat) calon Hakim Ad Hoc Hubungan industrial di MA atas nama Erwin, SH., MH dilanjutkan Dr. Junaedi, SE., SH., M.Si kemudian dilanjutkan Sugeng Santoso PN, SH., MM., MH, dan terakhir adalah Yoesoef Moesthafa, SE., SH. MH.

Akhirnya pada Selasa, 27 Maret 2018, Komisi III DPR RI melaksanakan Rapat Pleno guna mendengarkan pendapat dan pandangan Fraksi-fraksi terhadap Persetujuan Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA.

Berdasarkan pendapat dan pandangan dari 10 fraksi yang ada di Komisi III DPR RI, disepakati secara aklamasi untuk memberikan persetujuan terhadap dua calon Hakim Ad Hoc Hubungan industrial di Mahkamah Agung, yaitu Sdr Dr. Junaedi, SH., SE., MSi dari unsur SP/SB, dan Soengeng Santoso PN, SH., MM, MH dari unsur APINDO. ■ eko/sc

Komisi VIII Tinjau Lokasi Bencana Banjir di Jabar

Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid meninjau lokasi bencana longsor dan banjir di wilayah Bandung, Jawa Barat, dan sekitarnya, Rabu (4/4). Komisi VIII DPR RI juga ingin mendengar langsung keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat dalam menangani bencana itu.

“Sebagaimana kita ketahui sekitar dua minggu yang lalu, banjir masih terjadi di Kota Bandung yaitu di wilayah Cicaheum dan sekitarnya.

Banjir yang terjadi pada tanggal 20 Maret 2018 tersebut mengakibatkan kerusakan yang cukup parah yang berdampak pada rusaknya infrastruktur,” kata Sodik saat pertemuan dengan Kepala BPBD Jabar beserta jajaran, di Bandung, Jabar.

Selain itu, tambah politisi F-Gerindra itu, pada bulan yang sama juga terjadi bencana longsor yang terjadi di wilayah Bandung Barat yang merenggut korban jiwa. Akibat bencana banjir dan longsor tersebut, cukup menghambat berbagai kegiatan sosial, pendidikan dan ekonomi di wilayah tersebut.

“Untuk itu, kami berharap BPBD Jabar dapat memberikan penjelasan yang rinci mengenai permasalahan bencana yang sering terjadi, terutama permasalahan banjir dan longsor di wilayah Bandung

dan sekitarnya serta langkah-langkah yang dilakukan oleh BPBD Jabar untuk menangani persoalan ini,” kata Sodik.

Sodik menambahkan, dengan adanya penjelasan dari BPBD Jabar, diharapkan Komisi VIII DPR RI dapat memahami persoalan bencana banjir dan longsor yang sering terjadi di wilayah Bandung dan bisa menghasilkan solusi yang terbaik untuk penyelesaian masalah tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPBD Jabar Dicky Saromi menjelaskan kronologis bencana banjir yang terjadi di wilayah Bandung dan sekitarnya, karena hujan deras yang berlangsung pada 20 Maret 2018, sehingga menyebabkan Sungai Cicabe dan Cipamokolan meluap bercampur lumpur tumpah ke jalan, sehingga mengakibatkan jalur arteri sempat terputus.

“Kawasan Cicaheum, khususnya di Jl. AH. Nasution dan Jl. Soekarno Hatta terdampak cukup parah. Lumpur setebal

50-70 sentimeter melapisi jalan sehingga beberapa akses jalan terputus. Terdapat 17 mobil dan beberapa sepeda motor rusak berat disertai jebolnya beberapa tanggul. Pemerintah bersama aparat dan jajarannya yang terdiri dari aparat TNI/Polri, pemadam kebakaran, Satpol PP, BPBD maupun masyarakat umum saling bahu membahu membersihkan tumpukan sampah dan lumpur yang menutupi permukaan jalan tersebut,” kata Dicky.

Sementara itu, Dicky juga menjelaskan, korban yang tertimbun tanah longsor menyulitkan tim gabungan yang terdiri dari BPBD Bandung Barat, TNI/Polri, dan relawan serta masyarakat dalam pencarian korban. Namun dengan kerja keras meskipun tanpa bantuan alat berat akhirnya korban dapat diketemukan. Pasca kejadian, berbagai bantuan terus berdatangan dari berbagai pihak, baik dari komunitas masyarakat, pemerintah daerah, PMI serta partai politik. ■ hs/sc



Komisi VIII DPR RI meninjau lokasi bencana banjir di Bandung didampingi Kepala BPBD Jabar beserta jajaran

Sistem Digital Bisa Deteksi Penipuan Umrah dan Haji

Maraknya penipuan terhadap para calon jemaah umrah dan haji, salah satunya karena Kementerian Agama (Kemenag) belum mengakses sistem digital untuk mendeteksi penipuan yang dilakukan agen travel.

Di era terbuka seperti sekarang mestinya jejak digital sebuah perusahaan mudah diakses.



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Foto: odjje/od

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam rilisnya yang diterima Parlemen, Rabu (4/4).

Secara teoritis pemerintah mestinya mudah melacak jejak digital perusahaan travel haji dan umrah yang kerap menipu para calon jemaahnya. “Nah, kalau sekarang ini banyak penipuan, karena Kementerian Agama belum menggunakan sistem digital dalam melacak itu semua,” kata Fahri yang juga Ketua Timwas Haji dan Umrah DPR.

Kemenag juga gampang ditipu oleh travel haji dan umrah, karena

belum memaksimalkan data digital ini. “Harusnya, selain perlu memiliki data digital dan *database* yang besar, Kemenag dan kementerian terkait termasuk Kemenkum HAM, bisa mengakses izin suatu perusahaan, sehingga mudah dikonfirmasi secara elektronik,” ungkapnya lebih lanjut. Dengan sistem digital ini, potensi penipuan yang akan dilakukan perusahaan bisa segera terdeteksi.

Anggota DPR dari Nusa Tenggara Barat (NTB) itu pun menyatakan, perlu ada edukasi yang masif kepada masyarakat untuk bisa menemukan sendiri perusahaan-perusahaan yang punya *track record* yang buruk atau tidak punya izin lengkap. Pemerintah dan masyarakat juga berkomunikasi dengan perusahaan di Arab Saudi untuk melacak, apakah sebuah perusahaan betul-betul punya mitra atau tidak di tanah suci. Pemerintah harus mampu bersikap antisipatif atas persoalan ini. ■ mh/sc

Komisi I Berikan Dukungan Moral kepada Dokter Terawan

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almayahri mengatakan bahwa kedatangan Komisi I ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto untuk memberikan dukungan moral kepada Kepala RSPAD Mayjen TNI dr. Terawan Agus Putranto, atas pemecatan dirinya dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sementara waktu.



Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almayahri bersama Anggota Komisi I dan Kepala RSPAD memberikan keterangan pers

Foto: anief/od

“Selain itu, juga untuk memberikan pesan kepada masyarakat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan temuan-temuan terbaru, kami dari DPR RI memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap penanganan

pasien yang dilakukan dr. Terawan dan tim,” ucapnya di RSPAD, Senen, Jakarta, Rabu (4/4).

Terkait dengan dugaan pengiklanan diri dr. Terawan di media, Kharis menekankan bahwa seluruh biaya

pengobatan di RSPAD merupakan keputusan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Jadi tarif yang berlaku ini dan sebagainya, merupakan keputusan langsung dari Kemenkeu yang

Komisi III Prihatin Maraknya Peredaran Narkoba di Jateng

Anggota Komisi III DPR RI Tb. Soenmandjaja mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya peredaran narkoba di Jawa Tengah. Ia meminta seluruh pihak untuk berkoordinasi dalam mengungkap produsen dan pengedar narkoba tersebut.

“Indonesia dalam situasi darurat narkoba, penegakan hukum harus lebih keras, pembinaan dan rehabilitasi harus berjalan dengan baik,” ujarnya usai memimpin pertemuan Tim Komisi III dengan Wakapolda Jawa Tengah Kombes Pol Ahmad Lutfi, Kakanwil Kemenkumham Ibnu Chuldun, dan BNNP Jawa Tengah yang diwakili Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Sutomo di Kabupaten Sukoharjo, Jateng, Senin (2/4).

Dalam kesempatan tersebut, ia meminta Polda, BNN, dan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah untuk lebih meningkatkan profesionalitas kerja demi menciptakan rasa aman, pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.

Soenmandjaja mengatakan kunjungan kerja Komisi III ke Jateng adalah untuk mengetahui tantangan dan masalah yang dihadapi mitra kerja Komisi III dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya terkait penanganan narkoba, terorisme dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan orang asing di Provinsi Jawa Tengah.

Terkait pengawasan orang asing, legislator PKS ini, meminta Kanwil Kemenkumham meningkatkan kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, agar keberadaan orang asing tidak mengganggu stabilitas keamanan dan ekonomi di Indonesia.

“Kami mengapresiasi Kemenkumham yang telah bekerjasama hingga tingkat kecamatan dan elemen masyarakat lainnya dalam optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan orang asing,” tuturnya.

Selain itu, terkait pengungkapan peristiwa yang diduga berhubungan dengan tindak pidana terorisme, ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan menghargai HAM. “Oleh karena itu, tindakan tembak di tempat walaupun setuju, tapi Komisi Bidang Hukum DPR sebagai wakil rakyat ingin membongkar untuk mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnyanya dari para pelaku,” tutup Soenandjaja.

■ as/sc



Foto: agung/od

Komisi III DPR RI bersama dengan Wakapolda Jateng, Kakanwil Kemenkumham Jateng dan Kepala BNNP Jateng

menentukan besarnya, bukan dr. Terawan yang menentukan. Hal-hal seperti ini yang seharusnya bisa dicerna baik-baik, bahwa tidak mungkin seorang kepala rumah sakit TNI bisa menentukan sendiri biayanya,” tambahnya.

Kharis menambahkan bahwa surat keputusan dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) yang sudah beredar luas di media, merupakan pencemaran nama baik dari dr. Terawan dan RSPAD. Karena, keputusan MKEK seharusnya bersifat rahasia dan ditujukan langsung hanya ke Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).

“Akan tetapi hal ini malah beredar luas, dan saya kira yang jadi masalah adalah siapa yang mengedarkan ini. Sekali lagi saya tegaskan bahwa dr. Terawan belum pernah mendapatkan surat resmi dari PB IDI terkait dengan keputusan pemecatan terhadapnya yang beredar di media,” ujarnya.

Kharis mengharapkan sebagaimana amanat di Undang-Undang ITE bahwa jika ternyata berita ini tidak benar, maka kemudian berita-berita yang

mencemarkan nama baik ini harus ditarik dan dihapus.

Dalam kesempatan yang sama, dr. Terawan mengaku begitu sedih mendengar pemberitaan dirinya diberhentikan dari keanggotaan IDI sementara waktu. Ia bahkan mengaku belum sempat menerima surat yang saat ini tengah diviralkan tersebut. “Jujur, saya sedih mendengar ini. Sampai sekarang bahkan saya tidak tahu suratnya seperti apa,” katanya.

Diketahui, sempat beredar surat yang menyebutkan pemecatan kepada dr. Terawan dari keanggotaan IDI. Dalam surat IDI tertanggal 23 Maret 2018, dr. Terawan yang telah lama menerapkan metode pengobatan *Digital Substraction Angiography* (DSA) atau yang ramai dikatakan sebagai ‘cuci otak’ dalam menangani pasien *stroke* ini dinyatakan dipecat sementara sejak 26 Februari 2018. Pemecatan berlaku selama 1 tahun sebagai tindak lanjut atas putusan MKEK yang menyatakan dr. Terawan melakukan pelanggaran berat. ■ ila/sf



Pimpinan Komisi II DPR RI berjabat tangan dengan Pimpinan KPU dan Bawaslu

Foto: jayadi/od

Presiden dan Wapres yang Ikut Pilpres 2019 Punya Hak Cuti

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan Presiden dan Wakil Presiden yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2019 memiliki hak untuk cuti saat kampanye.

“Presiden memiliki hak cuti saat kampanye, namun tidak wajib. Beda dengan pilkada. Kalau pilkada itu wajib dia cuti selama kampanye, mau dipakai atau tidak itu terserah calon kepala daerah-nya,” jelas Riza di sela-sela RDP Komisi II dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri membahas aturan cuti bagi petahana presiden atau wakil presiden yang akan berkampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Namun, Riza mengingatkan cuti yang dilakukan Presiden dan Wakil Presiden jangan berbarengan agar tidak terjadi kekosongan hukum.

“Kampanye presiden dan wakil presiden harus diatur agar tidak berbarengan dan terjadi kekosongan hukum. Makanya nanti diatur dalam

peraturan pemerintah (PP) dan Peraturan KPU,” jelasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4).

Terkait durasi kampanye, politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, presiden dan wakil presiden bisa melakukan kampanye dalam rentang waktu pukul 08.00-18.00 WIB. Riza juga menyampaikan pengamanan dan protokoler tetap melekat pada presiden dan wakil presiden saat kampanye.

“Presiden dan wakil presiden masih bisa menggunakan fasilitas negara, seperti pengamanan, termasuk mobil kepresidenan, yang tidak boleh pesawat kepresidenan dan tidak boleh gunakan Istana untuk kampanye atau menerima terkait urusan kampanye tidak boleh,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, dalam mekanismenya dari pihak pemerintah akan membuat peraturan pemerintah (PP) dan KPU akan membuat peraturan KPU (PKPU) untuk mengatur cuti tersebut. Dia menyebutkan regulasi itu tidak bertentangan dengan UU Pemilu.

Sebab, dia beralasan untuk presiden ataupun wapres yang menjadi calon peserta pilpres tetap mendapatkan kekuasaannya secara utuh. Sedangkan untuk cuti mereka tidak menggunakan fasilitas negara.

“Kecuali fasilitas dasar yang melekat pada presiden dan wapres. Seperti pengamanan dan sebagainya,” katanya.

Wahyu menyebut konsep cuti di pemilihan kepala daerah atau pilkada berbeda dengan pilpres. Bahkan untuk capres petahana juga akan melaksanakan kampanye secara fleksibel yang tidak ditentukan oleh hari ataupun waktu.

Lanjut dia, untuk calon kepala daerah atau calon kepala daerah petahana saat melaksanakan kampanye harus melepaskan kekuasaannya seperti keluar dari rumah dinas yang ditempati. Sedangkan untuk capres petahana masih tetap berada di istana negara. ■ mm/sc

Komisi III Pertanyakan Kasus Penyerangan Gereja Lidwina

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafe'i mengapresiasi kinerja Kepolisian DI Yogyakarta dalam menangani kasus terorisme dan intoleransi umat beragama. Namun, ia mempertanyakan mengapa kasus penyerangan di Gereja Santa Lidwina Bedog Trihanggo Gamping di Sleman, atas tersangka Suliono, langsung ditetapkan sebagai kasus tindak pidana terorisme.

Hal tersebut menurutnya sangat berlebihan, karena dari paparan Kapolda pelaku hanya sendiri dan tidak memiliki jaringan bahkan senjata yang digunakan baru saja dibeli sehari sebelum pelaku melakukan penyerangan dan tidak ada rentetan peristiwa, apakah ini ancaman atau lain sebagainya.

“Saya bertanya kepada Pak Kapolda mengapa terlalu cepat menyimpulkan kasus penyerangan ini sebagai kasus tindak pidana terorisme, yang menyebabkan kondisi akan berdampak rawan,” papar politisi yang akrab disapa Romo ini saat pertemuan Tim Komisi III dengan Kapolda DIY, di Yogyakarta, Senin (2/4)

Politisi Gerindra ini meminta ke

depannya harus ada definisi yang jelas apa sebenarnya yang disebut terorisme. Hal ini agar jangan sampai persoalan yang tidak terlalu besar menjadi sangat krusial.

Menanggapi pernyataan tersebut, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Brigjen Pol Ahmad Dofiri menjelaskan bahwa pihak kepolisian tidak semerta-merta dalam melakukan penetapan namun terlebih dahulu mempelajari duduk persoalannya,

“Kita bekerja secara fakta, mengapa kita sebut ini kasus terorisme karena kita ambil arti dari kamus besar berbahasa Indonesia, dimana dalam pengertiannya tindakan penyerangan ini adalah tindakan kekerasan yang menimbulkan ketakutan yang sangat meluas,” jelasnya.

Ditambahkannya, saat berbicara

mengenai kasus penyerangan ini hanya sebatas penganiyayan, banyak mendapat komentar di media sosial. “Ribuan orang mem-bully atas pernyataan yang disampaikan,” imbuhnya.

Hal yang berbeda diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI Risa Mariska terkait dengan kasus penyerangan di Gereja Lidwina ini. Menurutnya jika dilihat dari kronologis beritanya kemudian apa yang ditimbulkan dari peristiwa itu maka perbuatan itu bisa dikategorikan teror.

“Perbuatan teror itu jelas menimbulkan rasa takut yang berdampak luas kepada masyarakat yang secara tidak langsung akan merasa tidak aman,” ungkapnya.

Lanjut Risa perbuatan teror ini bisa dikategorikan terorisme sebagaimana sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Terorisme. Kita tidak bisa keluar dari Undang-Undang Terorisme ini.

Jika Kepolisian menyatakan penyerangan ini bukan tindakan terorisme, sambung Risa, di luar

Perbuatan teror itu jelas menimbulkan rasa takut yang berdampak luas kepada masyarakat yang secara tidak langsung akan merasa tidak aman



Tim Kunspek Komisi III DPR RI berdialog dengan Kapolda DIY Yogyakarta

sana tentunya masyarakat akan mempertanyakan mengapa perbuatan penyerangan tersebut bukan tindakan terorisme dan akan ditanyakan kembali kepada pihak Kepolisian.

“Masyarakat akan bertanya apakah Kepolisian paham atau tidak pengertian dari terorisme”. ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

Diketahui penyerangan Gereja Santa Lidwina Bedog Trihanggo Gamping di Sleman dengan tersangka Suliono, terjadi pada Selasa (13/2) lalu, dimana pelaku melakukan aksi biadab dengan melakukan pembacokan pada umat dan romo saat sedang berlangsung misa Minggu pagi di Gereja Santa Lidwina Bedog. Empat orang terluka masih menjalani perawatan intensif hingga saat ini. ■ rni/sc

Sinergitas dan Efektifitas BRG Dipertanyakan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Waitimena mempertanyakan sinergitas dan efektifitas Badan Restorasi Gambut (BRG) dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan, mengingat kelembagaan BRG tidak sampai kepada kabupaten/kota dan provinsi.



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Waitimena

Foto: jakarta/od

“Bagaimana bisa membangun sinergitas, dan bisa efektif, jika BRG tidak punya kaki tangan di bawahnya. Ada sebuah keraguan dari sinergitas dan efektifitas dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut mengingat kelembagaan BRG tidak sampai pada tingkat kabupaten dan provinsi,” ungkap Michael saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Restorasi Gambut (BRG) di ruang rapat Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4).

Pada kesempatan itu, Michael juga mempertanyakan belum adanya sentuhan

dari KLHK dan BRG pada hutan dan lahan gambut di Papua. Hal ini apakah karena tingkat kerusakan dan kebakaran hutan dan lahan gambut di sana masih sedikit. Namun, sejatinya menurut politisi Partai Demokrat ini, mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya tindakan preventif (pencegahan) harus dilakukan terhadap hutan dan lahan di Papua.

“Papua merupakan jantung dan paru-paru dunia. Hutan dan potensinya yang begitu besar akan hancur begitu saja jika terjadi kebakaran,” ujar Michael.

Meski demikian Michael memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran KLHK dan BRG karena distorsi tingkat kebakaran sangat

jauh sekali, sebagaimana yang disebutkan dalam paparan KLHK yakni sebesar 69 persen pengurangannya. Angka yang sangat signifikan untuk sebuah tindakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut. ■ ayu/sc

Pemerintah Didesak Cabut PP Nomor 9 Tahun 2018

Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mendesak pemerintah untuk segera mencabut PP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri untuk mengatasi polemik impor garam.

Khilmi menilai PP yang baru saja terbit pada 15 Maret 2018 lalu tidak sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Pasalnya, PP

tersebut menghapus kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memberikan rekomendasi impor garam industri.

“Sebagai penggantinya, Kementerian Perindustrian justru diberikan kewenangan tersebut. Jadi saya mohon, pemerintah segera mencabut PP Nomor 9 Tahun 2018 ini karena tidak sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2016,” seru Khilmi dalam



Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi

Foto: andri/od

DPR Usulkan Penambahan Anggaran BMKG dan Basarnas

Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati mengusulkan adanya penambahan anggaran untuk Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas). Mengingat, kedua badan tersebut sangat berperan penting dalam mengantisipasi bencana alam.

“ Kita perlu menyamakan persepsi dan mendukung kedua badan ini, karena selama ini kita masih memandang sebelah mata kedua badan tersebut.

Hari ini saya minta kita samakan persepsi dan pikiran kita bahwa kedua badan ini berperan penting,” ungkap Sadarestuwati dalam RDP Komisi V DPR RI dengan BMKG dan Basarnas dengan agenda Potensi Gempa Bumi Megathrust serta Antisipasinya di Gedung DPR RI, Senayan,



Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati

Foto: Jakarta/od

Jakarta, Selasa (3/4).

Ia memaparkan, wilayah Indonesia yang terletak di *Ring of Fire* menjadikan Indonesia sebagai salah satu kawasan paling aktif gempa bumi di dunia, sehingga BMKG dan Basarnas dinilai perlu meningkatkan intensitas sosialisasi,

simulasi gempa bumi serta pelatihan potensi SAR kepada masyarakat. Menurutnya, hal tersebut tentu membutuhkan dukungan anggaran guna memperkuat mitigasi bencana di Indonesia.

Tak hanya itu, sambungnya, penambahan anggaran diperlukan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang bersertifikasi serta pemuktahiran peralatan dan peralatan pendukungnya.

“Cukup banyak peralatan BMKG yang mengalami kerusakan, tidak hanya di Jakarta tetapi hampir di seluruh daerah. Harapan kita cukup besar bagi mereka, namun kita juga harus membantu melakukan kegiatan preventif karena yang namanya Indonesia ini dikelilingi lempengan,” papar politisi F-PDI Perjuangan ini.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, pemotongan anggaran BMKG yang sebelumnya mendapat alokasi Rp1,7 triliun menjadi Rp1,5 triliun cukup berdampak signifikan pada instrumen observasi BMKG. Setidaknya, ada 30 persen instrumen BMKG yang tidak dapat divalidasi dan 30 persen lainnya tidak bisa dilakukan pemeliharaan sebagaimana mestinya.

Sementara, masyarakat juga dinilai belum siap menghadapi gempa, seperti yang terjadi 23 Januari 2018 lalu, Gempa Lebak dengan magnitudo 6,1 menguncang Jakarta. Pusat gempa yang jaraknya 150 kilometer di selatan Jakarta, membuat warga Jakarta panik dan gagap karena tidak tahu harus melakukan apa.

Menurutnya, kejadian alam tersebut membawa pesan penting bagi Jakarta, sebab masih diperlukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi resiko bencana.

“Sebagian besar warga Jakarta belum tahu langkah tepat dan paling aman saat terjadi gempa, warga terbiasa dengan banjir, bukan gempa bumi,” papar Dwikorita.

Diketahui, hasil *monitoring* BMKG terhadap aktivitas gempa Megathrust periode 2009 – 2017 (9 tahun) sebanyak 5.407 jumlah gempa. Rata-rata setiap tahun terjadi gempa Megathrust sebanyak 600 gempa dan terus menunjukkan pola fluktuatif setiap tahunnya. ■ ann/sc

interupsinya mewarnai Sidang Paripurna ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017- 2018 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4).

Politisi Gerindra ini menjelaskan, dalam Pasal 37 Ayat (3) UU No. 7/2016 menyebutkan, dalam hal impor Komoditas Pergaraman, menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian KKP sebagai kementerian teknis. Sedangkan, dalam PP Impor Garam Pasal 3 Ayat (2), Kemenperin disebut sebagai pihak yang berwenang memberikan rekomendasi kuota kebutuhan impor garam per tahun.

“Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi perhatian pemerintah, karena kita harus melindungi petani dan petambak garam di Indonesia. Jangan sampai kita membiarkan impor demi kepentingan segilintir orang,” tandas Khilmi dalam Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. ■ ann/sc

**Sebagai penggantinya,
Kementerian Perindustrian
justru diberikan
kewenangan tersebut.
Jadi saya mohon,
pemerintah segera
mencabut
PP Nomor 9 Tahun 2018
ini karena tidak sesuai
dengan
UU Nomor 7 Tahun 2016**



SMP dan Mts Kota Surabaya 100 Persen Siap Laksanakan UNBK 2018

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menyatakan, secara umum Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Surabaya, 100 persen sudah siap melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang akan dilaksanakan pada 23 - 26 April 2018 mendatang.



Komisi X DPR RI meninjau persiapan pelaksanaan UNBK di SMP Negeri 3 Sekolah Kebangsaan Surabaya

“Kami dari Komisi X mengucapkan selamat kepada anak-anak yang akan mengikuti UNBK. Semoga mereka dapat meningkatkan kejujuran. Karena kita semua menginginkan anak-anak kita ke depan memiliki integritas yang bermartabat dan dapat diandalkan,” kata Sutan, usai memimpin pertemuan Tim Komisi X dengan Wali Kota Surabaya dan jajarannya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (5/4).

Politisi F-Gerindra itu juga memberikan apresiasi kepada Walikota Surabaya yang telah menganggarkan anggaran pendidikan sebesar 32 persen dari APBD. “Kami melihat Kota Surabaya ini memiliki kesiapan, yang jadi pertanyaan kami ini ada apa. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari Wali Kota Surabaya, ternyata neraca pendidikan sudah lebih dari 30 persen. Ini salah satu indikator keberhasilan,” jelas Sutan.

Komisi X DPR, lanjutnya, akan mendorong dan meminta kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi untuk

mencontoh kesiapan Kota Surabaya. “Kalau kita ingin bangsa dan daerah maju, salah satu kuncinya di anggaran,” tandasnya.

Ia menginformasikan, masih banyak daerah yang mengalokasikan anggaran pendidikannya di bawah 5 persen. “Alhamdulillah di sini sudah 32 persen. Artinya keberpihakan terhadap dunia pendidikan sebagai mandatori UU itu sudah benar. Selama ini kami baru tahu di DKI Jakarta saja. Ternyata setelah mendapat penjelasan dari Ibu Walikota Surabaya, ternyata rahasianya ada di anggaran pendidikan APBD. Amanat UU saja hanya 20 persen,” jelas Anggota Dewan dapil Jambi ini.

Dijelaskan Sutan, dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing, tentu seluruh pihak harus belajar dari kondisi yang bermasalah. Dulu, sambungnya, ketika UN masih menggunakan kertas dan pensil, hal pertama yang menjadi masalah adalah sontek menyontek. Kedua, adanya

Semoga mereka dapat meningkatkan kejujuran. Karena kita semua menginginkan anak-anak kita ke depan memiliki integritas yang bermartabat dan dapat diandalkan

kebocoran soal. Namun, kini dengan menggunakan UNBK, soal didistribusikan dari pemerintah pusat langsung ke server sekolah-sekolah dan langsung ke komputer para siswa.

“Anak-anak tidak lagi saling menyontek. Artinya di sini terbina kejujuran diantara masing-masing siswa. Dengan demikian mereka akan meningkatkan literasi membaca. Karena literasi baca kita masih rendah,” ungkapny.

Ia menilai, UNBK ini suatu langkah yang sudah sangat cerdas yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. UNBK awalnya baru dilaksanakan oleh Sekolah Indonesia di Singapura dan Sekolah Indonesia di Malaysia. Seiring dengan itu, makin tahun makin banyak sekolah yang melaksanakan UNBK ini.

“Berarti pendidikan kita Insya Allah semakin baik. Ini yang kita lihat potret di Kota Surabaya. Kita bisa melihat potret yang ada di daerah-daerah lain yang masih menyedihkan. Jangankan bicara sarana komputer, sarana internetpun tidak ada. Demikian juga dengan sarana listrik tidak ada,” papar Sutan, sembari berharap dari kunjungan ke Kota Surabaya ini, dapat menjadi evaluasi pemerataan pendidikan di daerah lain.

Turut serta dalam pemantauan UNBK di Kota Surabaya ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, dan sejumlah Anggota Komisi X DPR RI diantaranya Noor Achmad, Rita Zahara, Ledia Hanifa Amaliah, Nizar Zahro, Laila Istiana, dan Anang Hermansyah. Tim juga didampingi Direktur Pembinaan SMP Kemendikbud Supriano, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan. ■ sc/sf



Seluruh Fraksi DPR RI menyepakati dan menandatangani RUU tentang SDA

Foto: azka/00

Pleno Baleg Sepakat RUU Sumber Daya Air Dibawa ke Paripurna

Seluruh fraksi di Badan Legislasi DPR RI menyepakati dengan bulat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sumber Daya Air. Selanjutnya, RUU ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI.

Kesepakatan ini diambil, setelah Baleg mengadakan rapat pleno yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto dengan Tim Pengusul RUU Sumber Daya Air dari Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Lasarus. Totok mengatakan draf RUU Sumber Daya Air selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk ditetapkan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR, dan selanjutnya ke pembahasan tingkat I.

“Pada hari ini Badan Legislasi mengesahkan draf RUU tentang Sumber Daya Air, yang telah selesai diharmonisasi, pembulatan dan penyempurnaan konsepsi terhadap draf ini, sehingga draf ini bisa dibawa ke paripurna untuk mendapat persetujuan, yang selanjutnya dibahas di tingkat satu,” papar Totok di Ruang Rapat Baleg, Selasa (3/4).

Menurut politisi PAN ini, RUU

Peran swasta dan badan usaha yang lain dalam pengelolaan air itu tentu harus memberikan perlindungan kepada hak-hak rakyat. Dan negara bertanggung jawab untuk menjaga agar mata air kita tetap lestari, itu yang menjadi poin-poin penting dalam undang-undang ini yang akan dibahas lebih lanjut di Komisi V

Sumber Daya Air disetujui secara bulat karena persoalan air adalah urusan yang sangat esensial bagi masyarakat. “Karena memang masalah air itu adalah salah

satu masalah yang sangat vital bagi kepentingan masyarakat kita, sehingga perlu ada undang-undang yang dengan jelas dan tegas memberikan perlindungan kepada rakyat kita untuk dapat memanfaatkan sumber daya air, dan terutama agar kita dapat melestarikan sumber daya air untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara kita,” jelas Totok.

Menurutnya yang menjadi catatan penting dari RUU Sumber Daya Air adalah hak dari setiap warga negara untuk mendapatkan air yang bersih dan air yang sehat. Kemudian juga pemerintah agar bisa memberikan pengelolaan yang sebaik-baiknya. Disamping itu, diberikan kesempatan untuk swasta dan badan usaha yang lain untuk mengelola air dengan tetap mengedepankan hak-hak rakyat atas air.

“Kemudian peran swasta dan badan usaha yang lain dalam pengelolaan air itu tentu harus memberikan perlindungan kepada hak-hak rakyat. Dan negara bertanggung jawab untuk menjaga agar mata air kita tetap lestari, itu yang menjadi poin-poin penting dalam undang-undang ini yang akan dibahas lebih lanjut di Komisi V,” urai Totok.

Berkenaan dengan peran serta swasta dalam pengelolaan air anggota dewan Dapil Jawa Timur V ini memaparkan, pemberian izin swasta dalam pengelolaan air didasarkan pada kajian-kajian kepentingan rakyat, kemudian pelestarian lingkungan, baru kepentingan usaha. “Jadi ketiganya harus memberikan hasil yang positif, yang tidak boleh merugikan rakyat dan negara,” ujar Totok.

Pada dasarnya penguasaan air dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya, Totok menjelaskan kewenangan itu ada pada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk memberikan perizinan, tentu akan ada syarat-syarat teknis yang akan dibahas lebih lanjut bersama dengan pemerintah. ■ eko/sc

“ Jamu itu adalah makanan atau minuman sehat yang tidak melalui uji klinis. Sedangkan obat harus melewati uji klinis. Komisi IX menjamin bahwa RUU ini tidak akan mematikan industri lokal, termasuk jamu sebagai kekuatan budaya tanaman lokal,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/4).

Dede menjelaskan, RUU Pengawasan Obat dan Makanan ini sebagai jawaban atas tuntutan BPOM terhadap produsen nakal yang sering kali kalah di tingkat pengadilan karena tidak ada penyidikan yang menyeluruh. Oleh karena itu, kewenangan BPOM ditambah dengan unsur pembinaan dan penindakan. Selain itu, Komisi IX DPR mengharapkan tidak ada kesalahan persepsi di tengah masyarakat mengenai RUU POM.

Politisi Partai Demokrat ini menilai ada anggapan yang kurang tepat mengenai RUU ini. Menurutnya RUU ini tidak bertujuan untuk mematikan industri kecil seperti jamu dan herbal. Anggapan tersebut lahir karena adanya mispersepsi antara obat dengan jamu yang sering disalahartikan oleh masyarakat.

Menurut Dede, belakangan ini banyak ditemukan jamu yang mengandung bahan kimia. Hal ini membuat jamu jadi sulit dibedakan dengan obat. Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan ini diharapkan bisa melindungi masyarakat dari penipuan produsen jamu ilegal. ■ eko/sc



Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi

Foto : azka/od

RUU Pengawasan Obat dan Makanan Tidak Mematikan Industri Lokal

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menjelaskan saat ini Komisi IX DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Obat dan Makanan. Menurutnya RUU ini akan memperkuat kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun penguatan BPOM tidak bertujuan untuk mematikan industri lokal seperti jamu, baginya jamu adalah warisan kebudayaan nusantara.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Sumatera Utara

Foto : chaabi/od

Hal itu terungkap saat pertemuan antara Komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dengan Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara, perwakilan Organisasi Keagamaan, dan beberapa tokoh agama Gereja Katolik di Sumatera Utara, Selasa (3/4).

“Dana Rp20 juta yang berasal dari Kanwil Kemenag dan disalurkan melalui Komisi VIII DPR ini adalah untuk membeli alat musik organ yang baru, agar tiap kali kegiatan keagamaan tidak perlu menyewa lagi. Meskipun dana ini terlihat kecil, tapi ini sudah proporsional menurut data dari Kanwil Kemenag Sumatera

Hubungan DPR dan Pemerintah Dinilai Semakin Harmonis

Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait menilai hubungan antara pemerintah dan DPR semakin harmonis, hal ini menyusul diterimanya secara aklamasi calon Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo tanpa ada perdebatan antar fraksi. Hal ini menunjukkan dukungan yang kuat dari parlemen terhadap Presiden Jokowi.

Politisi PDI-Perjuangan ini menjelaskan sudah tiga calon tunggal pejabat yang diajukan Jokowi ke DPR disetujui secara aklamasi. Diantaranya yakni, pergantian Kapolri, pergantian Panglima TNI dan terakhir adalah pergantian Gubernur BI. Ketiganya dicapai kesepakatan melalui musyawarah.

Maruarar menuturkan dukungan parlemen terhadap eksekutif cukup baik. Itu juga menunjukkan stabilitas politik dalam negeri berjalan dengan baik. "Ini semua menunjukkan bahwa Pak Jokowi mampu menjaga stabilitas politik dalam negeri. Setiap calon pejabat yang diusulkan Jokowi selalu disetujui DPR dengan aklamasi. Ini akan baik bagi bangsa ini," ujar Maruarar dalam keterangan pers yang diterima Parlemen, Kamis (29/3).

Diharapkan dengan terpilihnya



Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait

Perry Warjiyo, stabilitas ekonomi dan ketersediaan uang rupiah menjadi lebih baik. Tugas dan amanat Gubernur BI ini menjadi lebih berat karena akan menghadapi tahun politik menjelang pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019. Meski demikian, ia yakin Perry akan mampu meneruskan kinerja baik dari Gubernur BI sebelumnya yakni Agus Martowardojo.

Karenanya, relasi baik antara eksekutif dan legislatif sangat dibutuhkan guna menjaga stabilitas perekonomian nasional. Nantinya, DPR segera melakukan Rapat Paripurna sebelum menyerahkan kembali hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Gubernur BI ini kepada Presiden Jokowi. ■hs/sc

Ini semua menunjukkan bahwa Pak Jokowi mampu menjaga stabilitas politik dalam negeri.

Komisi VIII Salurkan Bantuan Kepada Gereja Katolik di Sumut

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Sumatera Utara mendapat aspirasi terkait minimnya sarana untuk menunjang kegiatan keagamaan. Salah satunya di Gereja Santo Markus, Pematang Siantar, yang belum memiliki alat musik organ untuk kegiatan keagamaan. Selama ini, pihak gereja masih membayar sewa untuk pengadaan alat musik tersebut.

Utara. Mudah-mudahan dana yang sudah kami berikan dapat bermanfaat dengan baik," harap Marwan.

Politisi F-PKB itu menambahkan, pertemuan yang dilakukan di Kanwil Kemenag ini merupakan upaya Komisi VIII DPR RI dalam melaksanakan tugasnya yakni menyerap aspirasi dari masyarakat

Dana Rp.20 juta yang berasal dari Kanwil Kemenag dan disalurkan melalui Komisi VIII DPR ini adalah untuk membeli alat musik organ yang baru, agar tiap kali kegiatan keagamaan tidak perlu menyewa lagi. Meskipun dana ini terlihat kecil, tapi ini sudah proporsional menurut data dari Kanwil Kemenag Sumatera Utara. Mudah-mudahan dana yang sudah kami berikan dapat bermanfaat dengan baik

setempat, sekaligus memantau pelaksanaan kebijakan pendidikan Agama Katolik, baik yang sudah berjalan maupun yang akan direalisasikan.

"Kehadiran Komisi VIII DPR di sini adalah untuk menyerap dan menghimpun aspirasi dari beberapa tokoh agama, terutama Agama Katolik yang minoritas, dengan jumlah 8,31 persen dari total penduduk di Sumut," jelas politisi asal Sumatera Utara itu.

■ cas/sf



Pertemuan Baleg DPR RI dipimpin Wakil Ketua Baleg M. Sarmuji dengan IDI, *civitas academica*, Forkopimda, TNI dan Polda Jawa Timur

UU Nomor 20 Tahun 2013 Perlu Direvisi

Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran ke Provinsi Jawa Timur mendapat aspirasi untuk merevisi UU tersebut. Kompetensi dokter dan lamanya pendidikan untuk menjadi dokter, menjadi poin yang diminta untuk direvisi.

Demikian terungkap saat pertemuan antara Baleg DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI M. Sarmuji dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur, *civitas academica* Universitas Airlangga, Universitas Surabaya, Universitas Wijaya Kusuma, Universitas Hang Tuah Surabaya, Forkopimda, serta

perwakilan dari TNI dan Polda di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Kamis (5/4).

Sarmuji mengaku sepakat dengan usulan revisi terkait perbaikan dalam sektor pelayanan, dengan menambahkan kurikulum etika dan komunikasi dalam pendidikan kedokteran. Ia menjelaskan, keluhan dari masyarakat selama ini adalah masalah pelayanan

dan komunikasi dokter di Indonesia yang dianggap kurang, dibandingkan pelayanan dokter rumah sakit di luar negeri. Akibatnya, banyak orang Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri.

“Ini bukan persoalan kualitas dokter di Indonesia yang kurang. Tapi karena pelayanan, etika dan cara berkomunikasi yang harus diperbaiki. Dengan adanya usulan itu, membuat Baleg semakin kuat untuk merevisi UU Nomor 20 Tahun 2013, karena ini salah satu undang-undang yang penting dan strategis untuk melindungi masyarakat dengan pelayanan dokter yang berkualitas,” jelas Sarmuji.

Menyinggung banyaknya pelajar yang memilih sekolah kedokteran di luar



BKSAP Kecam Tindakan Israel di Hari Tanah Palestina

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi' Munawar, mengecam tindakan Israel yang telah menembaki warga Palestina saat hendak melakukan peringatan Hari Tanah Palestina.

“ Hari Tanah Palestina adalah hari pada saat Israel melakukan penyitaan tanah milik Palestina pada tahun 1976. Apa yang dilakukan Israel telah melampaui batas dan tidak berperikemanusiaan. Saya mengecam tindakan Israel yang telah melakukan kekerasan terhadap ribuan warga Palestina yang hendak melakukan demonstrasi di Gaza,” ujar Rofi dalam siaran persnya yang diterima Parlemen di Jakarta, baru-baru ini.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Palestina, setidaknya delapan warga Palestina tewas dan lebih dari seribu orang terluka dalam bentrokan dengan pasukan keamanan Israel di perbatasan Gaza, Jumat (30/3) lalu. Ia memperkirakan aksi kekerasan itu akan memicu gelombang protes yang lebih besar dan masif.

Menurut Politisi dari Fraksi PKS, jumlah korban tewas dari rangkaian demonstrasi pada hari Jumat itu adalah yang terbesar sejak perang Israel terakhir di Gaza pada musim panas 2014.

Dijelaskannya, sejak 1948 kekerasan selalu menghiasi tanah Palestina dan terus terjadi setiap tahun hingga saat ini. Warga Palestina yang menuntut hak atas tanah mereka selalu dihadapi dengan tindakan represif tentara Israel. Sejak itu, warga Gaza menjalani periode panjang dalam kondisi ekonomi yang sulit, sementara pada saat bersamaan blokade Israel mungkin menjadi yang terbesar dalam 4 tahun gencatan senjata antara Hamas dan Israel.



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rofi' Munawar

Foto: odfje/od

“Demonstrasi warga Gaza dilakukan dengan damai meski terjadi konfrontasi yang melibatkan pemuda Palestina di dekat perbatasan dengan Israel beberapa kali. Akan tetapi untuk kesekian kalinya tanggapan Israel selalu dengan penembakan dan pembunuhan,” tambah Rofi.

Peringatan Hari Tanah Palestina ini dijadwalkan akan digelar selama 6 pekan yang berakhir pada tanggal 15 Mei pada hari Nakhah (bencana). Pada hari itu menandai perpindahan ratusan ribu orang Palestina karena pencaplokan tanah mereka oleh Israel pada tahun 1948. Warga Palestina telah lama menuntut hak atas tanah mereka untuk kembali. Akan tetapi, Israel berulang kali mengingkari itu. ■ ayu/sc

negeri, politisi F-PG itu berpendapat, dari sisi kualitas pendidikan, di Indonesia relatif berimbang dengan luar negeri. “Masalahnya ada di pasca pendidikan. Begitupun penggunaan teknologi, di Indonesia perlu ada peningkatan agar bisa masif seperti di luar negeri,” tegas Sarmuji.

Dalam kesempatan itu, perwakilan *civitas academica* meminta agar UU Nomor 20 Tahun 2013 tersebut ditinjau ulang. Mereka sepakat kompetensi dari sisi pelayanan dokter kepada masyarakat ditingkatkan. Namun mereka keberatan dengan lamanya pendidikan, dan mengusulkan tidak ada penambahan pendidikan selama 2-3 tahun untuk menjadi dokter layanan primer. Menurut mereka, karena untuk menjadi dokter sudah menempuh pendidikan akademis yang cukup lama panjang. ■ doe/sf

Foto: doerly/od



<https://1.wp.com/www.floreseditorial.com/>

Jumlah korban tewas dari rangkaian demonstrasi pada hari Jumat itu adalah yang terbesar sejak perang Israel terakhir di Gaza pada musim panas 2014.

Judul RUU Minol Diputuskan Pekan Depan

Ketua Pansus RUU Minuman Beralkohol (Minol) DPR RI Arwani Thomafi menjelaskan, hasil rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Minol, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/4), antara Panja DPR dengan Panja Pemerintah membahas dua pilihan judul.

Alternatif pertama, judul sesuai draf RUU yaitu Larangan Minuman Beralkohol, dan alternatif kedua RUU Minuman Beralkohol. “Dua opsi judul itulah yang akan dibahas kembali dalam rapat dan panja sepakat untuk memutuskan hal itu dalam rapat pansus,” ungkap Arwani.

Menurut politisi F-PPP ini, Anggota Pansus DPR berkomitmen pada pekan depan diharapkan seluruh fraksi bisa menghadirkan anggotanya yang diberi



Ketua Pansus RUU Minol DPR RI Arwani Thomafi

tugas di pansus untuk memutuskan mana judul yang dipilih.

“Pembahasan RUU ini cukup lama, salah satu yang paling alot adalah judul RUU ini. Makanya kita harapkan pekan depan soal judul ini bisa diselesaikan dan selanjutnya bisa dibahas Tim Perumus (Timus) dan Tim

Sinkronisasi (Timsin) untuk menyelesaikan seluruh turunan dari pembahasan RUU ini dan berharap pada minggu terakhir bulan April ini bisa dibawa ke Rapat Paripurna,” katanya.

Sebelumnya, dalam soal judul RUU, fraksi-fraksi DPR terbelah yakni fraksi yang menyetujui menggunakan nomenklatur dengan larangan minuman beralkohol adalah fraksi PPP, PKS, dan PAN.

Sementara itu, Fraksi PDIP, Gerindra, Hanura dan NasDem kompak lebih setuju menggunakan nomenklatur “pengendalian dan pengawasan”.

Sedangkan fraksi yang mengusulkan judul tanpa embel-embel “larangan” dan “pengendalian dan pengawasan” yakni Fraksi Golkar dan Fraksi PKB. Politisi dapil Jateng ini juga membantah terkait isu minuman beralkohol yang diperbolehkan dijual bebas di warung-warung.

“Semua fraksi dan pemerintah telah bulat menyetujui untuk melakukan penertiban dan melarang penjualan minuman beralkohol dijual di tempat-tempat bebas,” tandas Arwani menambahkan. ■ mp/sc

IDI Harus Bijak Sikapi Kasus Dokter Terawan

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) diimbau bijak menyikapi kasus dr. Terawan Agus Putranto yang baru saja dicabut izin praktiknya selama 12 bulan. Kasus ini masih kontroversial antara ingin menegakkan kode etik kedokteran dan temuan metode terapi yang dilakukan dr. Terawan.

“Saya menyarankan kepada kedua belah pihak untuk lebih mengedepankan kearifan dan penghormatan atas posisi masing-masing. Mengabaikan keberadaan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) tentu merupakan tindakan yang tidak tepat karena akan menjadi preseden buruk atas supremasi etik bagi profesi dokter. Namun, mengabaikan kontribusi atas temuan dan praktik dr. Terawan juga sikap yang bertolak belakang dari kenyataan di lapangan,” jelas Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati dalam rilisnya yang diterima Parlemen, Rabu (4/4).

Dia juga menyerukan agar IDI menyelesaikan persoalan ini dengan bijak, penuh semangat penegakan etik serta perlindungan konsumen. Sanksi bagi dr. Terawan dari MKEK yang dibentuk IDI merupakan kategori pelanggaran berat



Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati

seperti disebut Pasal 29 ayat (4) huruf angka 4 tentang Pedoman MKEK.

Seperti diketahui, dr. Terawan melakukan praktik cuci otak kepada para

pasiennya, terutama penderita stroke. Metode yang dikenal dengan *Intra Arterial Heparin Flushing (IAHF)* adalah modifikasi dari penggunaan teknik pencitraan dengan *Digital Subtraction Angiography (DSA)*. Kemudian tindakan dilanjutkan dengan *flushing heparin* dengan panduan kateter.

Ia menjelaskan pada otak penderita stroke terdapat bagian inti atau bagian otak yang mati dan penumbra atau bagian yang mati sebagian. Bagian yang rusak tidak bisa diperbaiki, tetapi bagian penumbra masih bisa. Nah, inilah yang oleh dr. Terawan dapat diintervensi radiologi untuk memperbaiki penumbra.

Berbagai testimoni positif, kata Okky, sempat dilontarkan masyarakat atas manfaat dan daya gunanya bagi penyembuhan penyakit. Namun, IDI seperti dilansir berbagai media, menilai dokter di RSPAD itu tak terbuka dan selalu enggan memberi penjelasan di forum ilmiah kedokteran.

“Kendati demikian, persoalan etik yang menjerat dr. Terawan juga fakta yang tidak bisa ditutupi. Persoalan internal di profesi dokter ini harus mendapat perhatian serius, khususnya oleh dokter Terawan,” imbuh politisi F-PPP tersebut. ■ mh/sc



Tim BURT DPR RI dipimpin Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso bertukar cenderamata dengan Direksi RS. Kasih Ibu

RS Kasih Ibu Surakarta Layak Layani Anggota DPR Beserta Keluarganya

Rumah Sakit Kasih Ibu di Surakarta, Jawa Tengah dinilai sudah layak melayani peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. PT. Asuransi Jasindo pun dinilai sudah tepat memilih RS Kasih Ibu sebagai RS *provider*-nya, karena fasilitas RS yang sudah memadai.

Demikian terungkap saat kunjungan kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso bertemu dengan Direksi RS Kasih Ibu di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (4/4).

“Dari kunjungan ini, kami melihat fasilitas yang ada, seperti sudah ada *magnetic resonance angiography* (MRA), dan fasilitas lainnya, serta dokter tetap, ini menjadi lebih meyakinkan kita bahwa RS ini mampu melayani para Anggota DPR RI beserta keluarganya, ketika mengalami gangguan kesehatan,” kata Agung.

Politisi Partai Demokrat ini pun mengapresiasi PT. Jasindo yang tepat dalam memilih RS *provider*-nya. “Jasindo

di dalam memilih RS *provider*-nya betul-betul dipilih. Tidak asal, dipilih RS yang bagus, yang cukup lengkap peralatannya sebagai mitra Jasindo. Kita tidak ragu lagi, Jasindo untuk bermitra dengan RS Kasih Ibu, Surakarta ini,” imbuh Agung.

Hal senada diungkapkan Ketua BURT DPR RI Anthon Sihombing. Politisi Partai Golkar itu menilai, RS ini memiliki kelengkapan fasilitas, dokter, serta rekam jejak yang memadai. Ia pun mengapresiasi RS yang telah memiliki *database* Anggota DPR RI beserta keluarganya.

“Kita minta seluruh nama Anggota DPR dan keluarga, ternyata sudah ada. Kita harapkan Jasindo bekerja sama dengan RS yang memiliki kelengkapan

alat, dokter, dan kelasnya yang berbobot,” harap Anthon.

Diketahui, pada tanggal 26 Januari 2015 lalu RS Kasih Ibu Surakarta mendapatkan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan predikat Lulus Akreditasi Tingkat Paripurna. Hal ini merupakan salah satu upaya RS. Kasih Ibu Surakarta untuk tetap mempertahankan mutu pelayanan dengan menjalankan pelayanan sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit.

Kunjungan kerja ini juga diikuti oleh Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti (F-Gerindra), Wakil Ketua BURT DPR RI Hasrul Azwar (F-PPP), dan Anggota BURT DPR RI Rendy M. Affandy Lamadjido (F-PDI Perjuangan), Gatot Sudjito (F-PG), dan Andi Fauziah Pujiwati (F-PG). ■ sf



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didampingi Pimpinan dan Anggota DPR RI menerima Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph. R. Donovan, Kamis (5/4). FOTO: JAKA/HR



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon melantik Satya Widya Yudha sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI menggantikan Meutya Viada Hafid, Rabu (4/4). FOTO: ARIEF/HR



Seluruh fraksi DPR RI menyepakati dan menandatangani Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sumber Daya Air untuk ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR RI, Selasa (3/4). FOTO: AZKA/HR